

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dalam membangun sebuah negara, Kurdistan Regional Government membutuhkan 4 unsur persyaratan pembentuk negara. Seperti, memiliki penduduk yang tetap, wilayah, pemerintah atau penguasa yang berdaulat dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain tersebut. Sehingga, KRG harus mendapatkan pengakuan internasional untuk dapat menjadi subjek hukum internasional dalam membentuk negara berdaulat. Maka dari itu, KRG melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan membangun kerjasama yang baik dengan negara tetangga seperti Turki.

Dalam hal ini, KRG Irak menggunakan jalur pemerintah yang dilakukan melalui diplomasi dengan cara menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan pemerintah Turki untuk mendapatkan pengakuan. Pertemuan tersebut diadakan seperti pada bulan Mei 2012 dalam membahas mengenai kerjasama isu-isu ekonomi dan terorisme, yang menghasilkan kontrak transfer minyak. Kemudian pada tanggal 26 November 2013, pertemuan ini dilakukan untuk menyerukan akhir dari konflik yang menyebabkan 45 ribu orang tewas. Selanjutnya pada minggu 26 februari 2017, dengan agenda pertemuan terkait hubungan ekonomi dan penyelamatan Mosul dari kelompok teroris ISIS.

Kemudian KRG dan Turki juga melakukan kerjasama dalam bisnis dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan kontrak dengan perusahaan swasta dari Turki pada tahun 2002 dan 2003, menjalin kerjasama perdagangan pada tahun 2008 yang menghasilkan keuntungan \$7 milyar untuk KRG, kemudian kerjasama membangun pipa gas pada tahun 2012, dibelinya 13 kontrak membangun perusahaan oleh Turki untuk tahun 2012 dan 2013 serta

Kerjasama penting dalam hubungan Turki dan KRG lainnya adalah Perjanjian Penjualan Gas Turki-KRG yang ditandatangani pada November 2013. Tidak hanya kerjasama dalam bisnis dan perdagangan, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan terutama menyangkut isu terorisme juga dilakukan. Seperti pada pertemuan tanggal 17 November 2016, Perdana Menteri Nechirvan Barzani dan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai upaya mendirikan kantor perwakilan KRG di Ankara dan kerjasama dalam mengatasi operasi tindakan terorisme. Dengan dilakukannya kerjasama antar kedua wilayah, membuktikan bahwa Turki hanya menjadikan KRG sebagai mitra dalam bekerjasama. Kesatuan politik Irak juga merupakan unit strategis penting untuk politik luar negeri Turki.

Hal ini menandakan bahwa Turki hanya mengakui KRG secara sementara dalam waktu tidak terbatas sebagai pemerintah yang dianggap terbukti menjalankan kekuasaan pemerintah di wilayah negara kedua. Dengan demikian, Kurdistan Regional Government hanya mendapatkan pengakuan secara *de facto* dari Turki.

Pemberian pengakuan secara *de facto* memang tidak membuat KRG menjadi negara berdaulat. Akan tetapi, status negara *de facto* yang didapatkan sudah menempatkan KRG pada posisi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan negara *de facto* dapat menentukan dan memiliki strategi yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, KRG memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, KRG dapat memilih membangun negara (*state-building*) dari pada tetap bergantung kepada pemerintah pusat, KRG dapat membuat peraturan di wilayah mereka, bekerjasama dengan negara manapun tanpa persetujuan langsung pemerintah Irak, dan juga kebebasan lainnya yang masih dalam ketetapan daerah otonom.